



## **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

### **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR            TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 311);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
28. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 555);

29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 2 );
33. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
dan  
WALIKOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 5.178.056.704.816,- (lima trilyun seratus tujuh puluh delapan milyar lima puluh enam juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus enam belas rupiah) berkurang sejumlah Rp. 6.553.114.928,- (enam milyar lima ratus lima puluh tiga juta seratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.171.503.589.888,- (lima trilyun seratus tujuh puluh satu milyar lima ratus tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

## 1. Pendapatan :

a. Semula	Rp. 4.605.700.737.151,-
b. Bertambah	<u>Rp. 62.803.589.487,-</u>

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 4.668.504.326.638,-

## 2. Belanja :

a. Semula	Rp. 5.167.056.704.816,-
b. (berkurang)	<u>Rp. (11.727.599.928,-)</u>

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 5.155.329.104.888,-

Defisit setelah perubahan (Rp. 486.824.778.250,-)

## 3. Pembiayaan :

## a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 572.355.967.665,-
2)(berkurang)	<u>Rp. (69.356.704.415,-)</u>

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 502.999.263.250,-

## b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 11.000.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 5.174.485.000,-</u>

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 16.174.485.000,-

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 486.824.778.250,-

Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,-

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

## a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 2.353.324.920.469,-
2)(berkurang)	<u>Rp. (35.829.330.350,-)</u>

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 2.317.495.590.119,-

## b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 1.404.313.958.313,-

2) Bertambah Rp. 4.045.843.956,-

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 1.408.359.802.269,-

## c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 848.061.858.369,-

2) Bertambah Rp. 94.587.075.881,-

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 942.648.934.250,-

## (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

## a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 1.909.562.850.000,-

2) Bertambah/  
(berkurang) Rp. -

Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp. 1.909.562.850.000,-

## b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 251.896.629.645,-

2) (Berkurang) (Rp. 56.554.357.777,-)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 195.342.271.868,-

## c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 82.515.616.099,-

2) (Berkurang) (Rp. 173.681.179,-)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 82.341.934.920,-

## d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 109.349.824.725,-

2) Bertambah Rp. 20.898.708.606,-

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 130.248.533.331,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp. 289.460.870.313,-

2) Bertambah Rp. 4.045.843.956,-

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 293.506.714.269,-

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp.1.061.625.528.000,-

2) Bertambah/  
(berkurang) Rp. -

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 1.061.625.528.000,-

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 53.227.560.000,-

2) Bertambah/  
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 53.227.560.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/  
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 0,-

b. Dana darurat

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/  
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,-

## c. Dana bagi hasil pajak

1) Semula Rp. 572.387.440.423,-

2) Bertambah Rp. 34.646.349.799,-

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 607.033.790.222,-

## d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 249.878.398.918,-

2) Bertambah Rp. 59.940.726.082,-

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 309.819.125.000,-

## e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 23.116.440.000,-

3) Bertambah/  
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 23.116.440.000,-

## f. Dana bagi hasil lainnya

1) Semula Rp. 2.679.579.028,-

2) Bertambah/  
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Dana bagi hasil lainnya Rp. 2.679.579.028,-

## g. Dana Insentif Daerah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/  
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Dana Insentif Daerah Rp. 0,-



### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1.971.510.082.985,-

2) Bertambah Rp. 77.079.703.598,-

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 2.048.589.786.583,-

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 3.195.546.621.831,-

2) (berkurang) (Rp. 88.807.303.526,-)

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 3.106.739.318.305,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 1.668.455.001.554,-

2) Bertambah Rp. 59.940.726.082,-

Jumlah belanja pegawai sejumlah setelah perubahan Rp. 1.728.395.727.636,-

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 5.425.660.144,-

2) Bertambah /  
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 5.425.660.144,-

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah /  
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,-

d. Belanja hibah

1) Semula Rp. 284.529.421.287,-

2) Bertambah Rp. 12.620.803.287,-

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 297.150.224.574,-

## e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 1.045.000.000,-

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 1.045.000.000,-

## f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 1.200.000.000,-

2) Bertambah Rp. 3.473.174.229,-

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 4.673.174.229,-

## g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 1.900.000.000,-

2) Bertambah /  
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 1.900.000.000,-

## h. Belanja tidak Terduga

1) Semula Rp. 10.000.000.000,-

2) Bertambah/  
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

## a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 388.997.942.475,-

2) Bertambah Rp. 5.854.891.421,-

Jumlah belanja pegawai sejumlah setelah perubahan Rp. 394.852.833.896,-

## b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 1.557.802.937.743,-

2) (berkurang) (Rp. 6.514.725.497,-)

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 1.551.288.212.246,-

c. Belanja modal	
1) Semula	Rp. 1.248.745.741.613,-
2) (berkurang)	<u>(Rp. 88.147.469.450,-)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 1.160.598.272.163,-

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah	
1) Semula	Rp. 572.355.967.665,-
2) (berkurang)	<u>(Rp. 69.356.704.415,-)</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 502.999.263.250,-
b. Pengeluaran sejumlah	
1) Semula	Rp. 11.000.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 5.174.485.000,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 16.174.485.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	
1) Semula	Rp. 572.355.967.665,-
2) (berkurang)	<u>(Rp. 69.356.704.415,-)</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp. 502.999.263.250,-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp. 0,-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 0,-

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,-

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah /  
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,-

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah /  
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. 0,-

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,-

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah /  
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp. 0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah /  
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,-

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 5.174.485.000,-

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 5.174.485.000,-

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp. 5.174.485.000,-

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 11.000.000.000,-

1) Semula Rp. 11.000.000.000,-

2) Bertambah /  
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang  
jatuh tempo setelah perubahan Rp. 11.000.000.000,-

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,-

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah /  
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah  
perubahan Rp. 0,-

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran I A : Urusan Kas dan Perhitungan;
3. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
4. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
10. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

**Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA,**

**TRI RISMAHARINI**

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
RINGKASAN PERUBAHAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2012**

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(RP.)	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>				
<b>1 1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>				
1 1 1	Hasil Pajak Daerah	1.909.562.850.000	1.909.562.850.000	0	0
1 1 2	Hasil Retribusi Daerah	251.896.629.645	195.342.271.868	(56.554.357.777)	(22.45)
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	82.515.616.099	82.341.934.920	(173.681.179)	(0.21)
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	109.349.824.725	130.248.533.331	20.898.708.606	19.11
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>2.353.324.920.469</b>	<b>2.317.495.590.119</b>	<b>(35.829.330.350)</b>	<b>(1.52)</b>
<b>1 2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>				
1 2 1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	289.460.870.313	293.506.714.269	4.045.843.956	1.40
1 2 2	Dana Alokasi Umum	1.061.625.528.000	1.061.625.528.000	0	0
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	53.227.560.000	53.227.560.000	0	0
	<b>Jumlah Dana Perimbangan</b>	<b>1.404.313.958.313</b>	<b>1.408.359.802.269</b>	<b>4.045.843.956</b>	<b>0.29</b>
<b>1 3</b>	<b>Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>				
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	572.387.440.423	607.033.790.222	34.646.349.799	6.05
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	249.878.398.918	309.819.125.000	59.940.726.082	23.99
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	23.116.440.000	23.116.440.000	0	0
1 3 6	Bagi Hasil Lainnya	2.679.579.028	2.679.579.028	0	0
	<b>Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>848.061.858.369</b>	<b>942.648.934.250</b>	<b>94.587.075.881</b>	<b>11.15</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>4.605.700.737.151</b>	<b>4.668.504.326.638</b>	<b>62.803.589.487</b>	<b>1.36</b>
<b>2</b>	<b>Belanja Daerah</b>				
<b>2 1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>				
2 1 1	Belanja Pegawai	1.668.455.001.554	1.728.395.727.636	59.940.726.082	3.59
2 1 2	Belanja Bunga	5.425.660.144	5.425.660.144	0	0
2 1 4	Belanja Hibah	284.529.421.287	297.150.224.574	12.620.803.287	4.44
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	0	1.045.000.000	1.045.000.000	100.00
2 1 6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.200.000.000	4.673.174.229	3.473.174.229	289.43
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.900.000.000	1.900.000.000	0	0
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0
	<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.971.510.082.985</b>	<b>2.048.589.786.583</b>	<b>77.079.703.598</b>	<b>3.91</b>
<b>2 2</b>	<b>Belanja Langsung</b>				
2 2 1	Belanja Pegawai	388.997.942.475	394.852.833.896	5.854.891.421	1.51
2 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.557.802.937.743	1.551.288.212.246	(6.514.725.497)	(0.42)
2 2 3	Belanja Modal	1.248.745.741.613	1.160.598.272.163	(88.147.469.450)	(7.06)
	<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>3.195.546.621.831</b>	<b>3.106.739.318.305</b>	<b>(88.807.303.526)</b>	<b>(2.78)</b>
	<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>5.167.056.704.816</b>	<b>5.155.329.104.888</b>	<b>(11.727.599.928)</b>	<b>(0.23)</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(561.355.967.665)</b>	<b>(486.824.778.250)</b>	<b>74.531.189.415</b>	<b>(13.28)</b>
<b>3</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>				
<b>3 1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>				
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	572.355.967.665	502.999.263.250	(69.356.704.415)	(12.12)
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>572.355.967.665</b>	<b>502.999.263.250</b>	<b>(69.356.704.415)</b>	<b>(12.12)</b>
<b>3 2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>				
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0	5.174.485.000	5.174.485.000	100.00
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	11.000.000.000	11.000.000.000	0	0
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>16.174.485.000</b>	<b>5.174.485.000</b>	<b>47.04</b>

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(RP.)	%
	<b>Jumlah Pembiayaan Daerah Neto</b>	561.355.967.665	486.824.778.250	(74.531.189.415)	(13.28)
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SILPA )</b>	0	0	0	0.00

Surabaya,

**WALIKOTA SURABAYA****TRI RISMAHARINI**



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
 RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI  
 TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				Rp.	Rp.	Rp.	%	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
		3	4	5=4-3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib</b>												
<b>1 01</b>	<b>Pendidikan</b>												
1 01 0100	Dinas Pendidikan	0	0	0	0	933.883.354.918	451.096.690.214	1.384.980.045.132	987.030.689.045	442.588.995.940	1.429.619.684.985	44.639.639.853	3.22
	<b>Jumlah Pendidikan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933.883.354.918</b>	<b>451.096.690.214</b>	<b>1.384.980.045.132</b>	<b>987.030.689.045</b>	<b>442.588.995.940</b>	<b>1.429.619.684.985</b>	<b>44.639.639.853</b>	<b>3.22</b>
<b>1 02</b>	<b>Kesehatan</b>												
1 02 0100	Dinas Kesehatan	20.012.506.700	20.012.506.700	0	0	103.019.853.161	286.107.978.742	389.127.831.903	103.822.022.655	301.612.217.839	405.434.240.494	16.306.408.591	4.19
1 02 0200	Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie	26.000.000.000	43.000.000.000	17.000.000.000	65.38	19.237.932.419	179.865.309.444	199.103.241.863	20.052.726.413	167.905.746.047	187.958.472.460	(11.144.769.403)	(5.60)
1 02 0300	Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0	14.561.208.000	78.356.722.876	92.917.930.876	14.561.208.000	75.891.585.164	90.452.793.164	(2.465.137.712)	(2.65)
	<b>Jumlah Kesehatan</b>	<b>61.012.506.700</b>	<b>78.012.506.700</b>	<b>17.000.000.000</b>	<b>27.86</b>	<b>136.818.993.580</b>	<b>544.330.011.062</b>	<b>681.149.004.642</b>	<b>138.435.957.068</b>	<b>545.409.549.050</b>	<b>683.845.506.118</b>	<b>2.696.501.476</b>	<b>0.40</b>
<b>1 03</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>												
1 03 0100	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	0	0	0	0	21.845.838.657	632.975.210.877	654.821.049.534	21.914.281.450	622.083.581.048	643.997.862.498	(10.823.187.036)	(1.65)
	<b>Jumlah Pekerjaan Umum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.845.838.657</b>	<b>632.975.210.877</b>	<b>654.821.049.534</b>	<b>21.914.281.450</b>	<b>622.083.581.048</b>	<b>643.997.862.498</b>	<b>(10.823.187.036)</b>	<b>(1.65)</b>
<b>1 04</b>	<b>Perumahan Rakyat</b>												
1 04 0100	Dinas Kebakaran	2.400.000.000	1.723.117.174	(676.882.826)	(28.20)	21.347.888.000	26.263.167.198	47.611.055.198	21.347.888.000	27.281.722.900	48.629.610.900	1.018.555.702	2.14
1 04 0200	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	77.898.234.451	39.393.807.110	(38.504.427.341)	(49.43)	6.945.633.182	56.123.742.096	63.069.375.278	6.846.324.027	57.665.051.353	64.511.375.380	1.442.000.102	2.29
	<b>Jumlah Perumahan Rakyat</b>	<b>80.298.234.451</b>	<b>41.116.924.284</b>	<b>(39.181.310.167)</b>	<b>(48.79)</b>	<b>28.293.521.182</b>	<b>82.386.909.294</b>	<b>110.680.430.476</b>	<b>28.194.212.027</b>	<b>84.946.774.253</b>	<b>113.140.986.280</b>	<b>2.460.555.804</b>	<b>2.22</b>

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				Rp.	Rp.	Rp.	%	TIDAK LANGSUNG Rp.	LANGSUNG Rp.	JUMLAH BELANJA Rp.	TIDAK LANGSUNG Rp.	LANGSUNG Rp.	JUMLAH BELANJA Rp.
		3	4	5=4-3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
<b>1 05</b>	<b>Penataan Ruang</b>												
1 05 0100	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	65.000.000.000	53.588.826.497	(11.411.173.503)	(17.56)	13.917.279.197	373.576.644.921	387.493.924.118	14.904.833.039	321.380.793.287	336.285.626.326	(51.208.297.792)	(13.22)
	<b>Jumlah Penataan Ruang</b>	<b>65.000.000.000</b>	<b>53.588.826.497</b>	<b>(11.411.173.503)</b>	<b>(17.56)</b>	<b>13.917.279.197</b>	<b>373.576.644.921</b>	<b>387.493.924.118</b>	<b>14.904.833.039</b>	<b>321.380.793.287</b>	<b>336.285.626.326</b>	<b>(51.208.297.792)</b>	<b>(13.22)</b>
<b>1 06</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>												
1 06 0100	Badan Perencanaan Pembangunan	0	0	0	0	11.667.700.000	15.873.537.144	27.541.237.144	11.725.550.000	15.207.661.280	26.933.211.280	(608.025.864)	(2.21)
	<b>Jumlah Perencanaan Pembangunan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.667.700.000</b>	<b>15.873.537.144</b>	<b>27.541.237.144</b>	<b>11.725.550.000</b>	<b>15.207.661.280</b>	<b>26.933.211.280</b>	<b>(608.025.864)</b>	<b>(2.21)</b>
<b>1 07</b>	<b>Perhubungan</b>												
1 07 0100	Dinas Perhubungan	37.084.968.620	37.084.968.620	0	0	34.103.356.415	97.681.253.657	131.784.610.072	36.446.910.828	82.566.892.910	119.013.803.738	(12.770.806.334)	(9.69)
	<b>Jumlah Perhubungan</b>	<b>37.084.968.620</b>	<b>37.084.968.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.103.356.415</b>	<b>97.681.253.657</b>	<b>131.784.610.072</b>	<b>36.446.910.828</b>	<b>82.566.892.910</b>	<b>119.013.803.738</b>	<b>(12.770.806.334)</b>	<b>(9.69)</b>
<b>1 08</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>												
1 08 0100	Badan Lingkungan Hidup	8.500.000.000	7.500.000.000	(1.000.000.000)	(11.76)	5.901.375.262	16.009.091.804	21.910.467.066	5.677.182.338	15.780.339.239	21.457.521.577	(452.945.489)	(2.07)
1 08 0200	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	33.804.107.426	30.940.641.116	(2.863.466.310)	(8.47)	38.779.606.620	245.595.346.962	284.374.953.582	38.972.173.152	238.376.892.507	277.349.065.659	(7.025.887.923)	(2.47)
	<b>Jumlah Lingkungan Hidup</b>	<b>42.304.107.426</b>	<b>38.440.641.116</b>	<b>(3.863.466.310)</b>	<b>(9.13)</b>	<b>44.680.981.882</b>	<b>261.604.438.766</b>	<b>306.285.420.648</b>	<b>44.649.355.490</b>	<b>254.157.231.746</b>	<b>298.806.587.236</b>	<b>(7.478.833.412)</b>	<b>(2.44)</b>
<b>1 10</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>												
1 10 0100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	980.350.000	980.350.000	0	0	7.760.239.605	19.043.733.447	26.803.973.052	7.809.702.416	18.480.320.381	26.290.022.797	(513.950.255)	(1.92)
	<b>Jumlah Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	<b>980.350.000</b>	<b>980.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.760.239.605</b>	<b>19.043.733.447</b>	<b>26.803.973.052</b>	<b>7.809.702.416</b>	<b>18.480.320.381</b>	<b>26.290.022.797</b>	<b>(513.950.255)</b>	<b>(1.92)</b>
<b>1 12</b>	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>												
1 12 0100	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	0	0	0	0	15.093.607.489	20.671.026.761	35.764.634.250	15.174.009.570	20.671.026.761	35.845.036.331	80.402.081	0.22
	<b>Jumlah Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.093.607.489</b>	<b>20.671.026.761</b>	<b>35.764.634.250</b>	<b>15.174.009.570</b>	<b>20.671.026.761</b>	<b>35.845.036.331</b>	<b>80.402.081</b>	<b>0.22</b>
<b>1 13</b>	<b>Sosial</b>												
1 13 0100	Dinas Sosial	0	0	0	0	6.742.456.693	34.794.441.059	41.536.897.752	6.738.493.045	35.453.808.755	42.192.301.800	655.404.048	1.58
	<b>Jumlah Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.742.456.693</b>	<b>34.794.441.059</b>	<b>41.536.897.752</b>	<b>6.738.493.045</b>	<b>35.453.808.755</b>	<b>42.192.301.800</b>	<b>655.404.048</b>	<b>1.58</b>



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				Rp.	Rp.	Rp.	%	TIDAK LANGSUNG Rp.	LANGSUNG Rp.	JUMLAH BELANJA Rp.	TIDAK LANGSUNG Rp.	LANGSUNG Rp.	JUMLAH BELANJA Rp.
		3	4	5=4-3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
1 20 0100	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	0	0	15.984.866.750	0	15.984.866.750	16.025.906.032	0	16.025.906.032	41.039.282	0,26
1 20 0200	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	0	0	0	2.188.883.385	0	2.188.883.385	2.188.883.385	0	2.188.883.385	0	0
1 20 0300	Sekretariat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 20 0301	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0	0	0	0	2.263.677.760	3.031.731.130	5.295.408.890	2.307.371.175	3.172.526.127	5.479.897.302	184.488.412	3,48
1 20 0302	Bagian Hukum	0	0	0	0	3.606.016.026	3.920.759.826	7.526.775.852	3.621.197.588	3.920.759.826	7.541.957.414	15.181.562	0,20
1 20 0303	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	0	0	0	0	1.731.192.730	1.649.869.452	3.381.062.182	1.777.959.186	1.649.869.452	3.427.828.638	46.766.456	1,38
1 20 0304	Bagian Kerjasama	0	0	0	0	2.220.804.905	11.787.686.398	14.008.491.303	2.112.880.896	11.789.285.698	13.902.166.594	(106.324.709)	(0,76)
1 20 0305	Bagian Bina Program	0	0	0	0	3.972.415.142	7.841.470.444	11.813.885.586	3.990.169.591	7.699.323.317	11.689.492.908	(124.392.678)	(1,05)
1 20 0306	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah	0	0	0	0	1.320.640.953	1.592.875.914	2.913.516.867	1.381.716.499	1.654.497.756	3.036.214.255	122.697.388	4,21
1 20 0307	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	1.595.143.854	1.053.979.210	2.649.123.064	1.627.771.799	1.047.979.210	2.675.751.009	26.627.945	1,01
1 20 0308	Bagian Umum dan Protokol	0	0	0	0	13.964.235.735	35.370.005.855	49.334.241.590	13.675.002.917	47.409.114.258	61.084.117.175	11.749.875.585	23,82
1 20 0309	Bagian Perlengkapan	1.000.000.000	1.010.800.000	10.800.000	1,08	4.590.784.602	104.321.974.778	108.912.759.380	4.789.460.000	102.414.425.776	107.203.885.776	(1.708.873.604)	(1,57)
1 20 0310	Bagian Hubungan Masyarakat	0	0	0	0	2.209.772.146	5.387.300.249	7.597.072.395	1.931.203.815	5.691.764.079	7.622.967.894	25.895.499	0,34
1 20 0400	Sekretariat DPRD	0	0	0	0	5.643.900.291	69.466.620.693	75.110.520.984	5.927.934.930	68.852.185.305	74.780.120.235	(330.400.749)	(0,44)
1 20 0500	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	4.314.219.090.314	4.414.277.002.781	100.057.912.467	2,32	390.389.356.515	49.555.841.364	439.945.197.879	407.556.273.509	43.493.738.932	451.050.012.441	11.104.814.562	2,52
1 20 0700	Inspektorat	0	0	0	0	6.513.512.000	4.967.131.328	11.480.643.328	6.427.985.000	5.040.534.298	11.468.519.298	(12.124.030)	(0,11)
1 20 0900	Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 20 0901	Kecamatan Genteng	0	0	0	0	6.608.686.368	3.885.386.129	10.494.072.497	6.465.295.663	3.925.277.319	10.390.572.982	(103.499.515)	(0,99)
1 20 0902	Kecamatan Simokerto	0	0	0	0	4.780.809.988	3.704.190.001	8.484.999.989	5.036.526.477	3.767.097.001	8.803.623.478	318.623.489	3,76
1 20 0903	Kecamatan Tegalsari	0	0	0	0	6.111.809.378	3.830.389.153	9.942.198.531	5.926.970.246	3.909.658.153	9.836.628.399	(105.570.132)	(1,06)
1 20 0904	Kecamatan Bubutan	0	0	0	0	5.725.784.388	3.965.158.180	9.690.942.568	5.841.027.138	4.019.545.629	9.860.572.767	169.630.199	1,75
1 20 0905	Kecamatan Kenjeran	0	0	0	0	4.598.967.515	3.445.881.034	8.044.848.549	4.598.193.015	3.518.842.925	8.117.035.940	72.187.391	0,90
1 20 0906	Kecamatan Pabean Cantian	0	0	0	0	5.458.618.594	4.070.750.789	9.529.369.383	5.343.457.987	4.134.276.602	9.477.734.589	(51.634.794)	(0,54)
1 20 0907	Kecamatan Semampir	0	0	0	0	5.037.840.000	4.728.244.543	9.766.084.543	4.968.809.719	4.845.723.443	9.814.533.162	48.448.619	0,50
1 20 0908	Kecamatan Krembangan	0	0	0	0	5.668.785.307	3.536.358.494	9.205.143.801	5.664.307.491	3.636.852.994	9.301.160.485	96.016.684	1,04
1 20 0909	Kecamatan Tambaksari	0	0	0	0	6.131.084.000	5.294.513.827	11.425.597.827	6.289.904.000	5.379.442.427	11.669.346.427	243.748.600	2,13
1 20 0910	Kecamatan Gubeng	0	0	0	0	6.070.612.000	4.268.963.984	10.339.575.984	6.250.936.977	4.351.553.584	10.602.490.561	262.914.577	2,54
1 20 0911	Kecamatan Rungkut	0	0	0	0	5.254.627.381	4.517.616.409	9.772.243.790	5.213.971.095	4.569.616.809	9.783.587.904	11.344.114	0,12
1 20 0912	Kecamatan Gunung Anyar	0	0	0	0	4.572.233.184	3.169.396.462	7.741.629.646	4.634.730.853	3.249.995.662	7.884.726.515	143.096.869	1,85
1 20 0913	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	0	0	0	0	4.349.574.367	3.030.193.504	7.379.767.871	4.586.740.779	3.081.083.504	7.667.824.283	288.056.412	3,90

**X**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				Rp.	Rp.	Rp.	%	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
		3	4	5=4-3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
1 20 0914	Kecamatan Sukolilo	0	0	0	0	5.778.282.238	4.553.450.454	10.331.732.692	5.946.355.121	4.603.397.154	10.549.752.275	218.019.583	2.11
1 20 0915	Kecamatan Mulyorejo	0	0	0	0	6.306.711.177	4.239.491.457	10.546.202.634	5.775.929.439	4.247.665.017	10.023.594.456	(522.608.178)	(4.96)
1 20 0916	Kecamatan Wonokromo	0	0	0	0	6.884.687.775	4.996.619.282	11.881.307.057	7.176.969.259	5.075.665.282	12.252.634.541	371.327.484	3.13
1 20 0917	Kecamatan Karang Pilang	0	0	0	0	5.198.598.151	2.877.926.416	8.076.524.567	5.113.992.235	2.918.121.916	8.032.114.151	(44.410.416)	(0.55)
1 20 0918	Kecamatan Dukuh Pakis	0	0	0	0	4.632.882.009	3.007.179.763	7.640.061.772	4.701.136.577	3.059.550.227	7.760.686.804	120.625.032	1.58
1 20 0919	Kecamatan Gayungan	0	0	0	0	5.165.512.737	2.836.775.320	8.002.288.057	5.056.697.409	2.871.328.120	7.928.025.529	(74.262.528)	(0.93)
1 20 0920	Kecamatan Jambangan	0	0	0	0	4.778.601.834	2.655.347.415	7.433.949.249	4.729.811.601	2.717.499.015	7.447.310.616	13.361.367	0.18
1 20 0921	Kecamatan Wonocolo	0	0	0	0	5.387.378.320	3.537.897.677	8.925.275.997	5.409.327.138	3.575.123.477	8.984.450.615	59.174.618	0.66
1 20 0922	Kecamatan Sawahan	0	0	0	0	6.324.372.000	4.962.891.994	11.287.263.994	6.494.883.085	5.015.115.994	11.509.999.079	222.735.085	1.97
1 20 0923	Kecamatan Wiyung	0	0	0	0	4.660.502.962	2.632.900.089	7.293.403.051	4.511.233.895	2.670.233.489	7.181.467.384	(111.935.667)	(1.53)
1 20 0924	Kecamatan Tandes	0	0	0	0	6.818.760.341	3.829.125.428	10.647.885.769	6.627.676.831	3.859.418.428	10.487.095.259	(160.790.510)	(1.51)
1 20 0925	Kecamatan Asem Rowo	0	0	0	0	4.409.187.308	2.751.636.552	7.160.823.860	4.670.095.943	2.798.466.252	7.468.562.195	307.738.335	4.30
1 20 0926	Kecamatan Sukomanunggal	0	0	0	0	4.904.640.000	3.238.129.270	8.142.769.270	5.076.540.000	3.310.309.270	8.386.849.270	244.080.000	3.00
1 20 0927	Kecamatan Benowo	0	0	0	0	4.770.233.050	3.352.264.617	8.122.497.667	4.916.537.651	3.411.400.616	8.327.938.267	205.440.600	2.53
1 20 0928	Kecamatan Lakarsantri	0	0	0	0	5.805.354.468	3.547.722.241	9.353.076.709	5.970.868.332	3.599.685.541	9.570.553.873	217.477.164	2.33
1 20 0929	Kecamatan Sambikerep	0	0	0	0	4.302.872.592	2.972.535.721	7.275.408.313	4.708.623.122	3.031.819.521	7.740.442.643	465.034.330	6.39
1 20 0930	Kecamatan Pakal	0	0	0	0	5.426.346.196	3.097.459.425	8.523.805.621	5.388.446.384	3.154.324.925	8.542.771.309	18.965.688	0.22
1 20 0931	Kecamatan Bulak	0	0	0	0	4.719.840.520	3.048.607.518	7.768.448.038	4.555.324.258	3.094.791.453	7.650.115.711	(118.332.327)	(1.52)
1 20 1200	Badan Kepegawaian dan Diklat	0	0	0	0	9.130.117.590	15.579.675.926	24.709.793.516	9.499.294.158	15.579.675.926	25.078.970.084	369.176.568	1.49
<b>Jumlah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>		<b>4.315.219.090.314</b>	<b>4.415.287.802.781</b>	<b>100.068.712.467</b>	<b>2.32</b>	<b>633.969.516.532</b>	<b>429.111.925.715</b>	<b>1.063.081.442.247</b>	<b>652.492.330.200</b>	<b>434.818.561.709</b>	<b>1.087.310.891.909</b>	<b>24.229.449.662</b>	<b>2.28</b>
<b>1 21</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>												
1 21 0100	Kantor Ketahanan Pangan	0	0	0	0	1.553.205.293	974.750.343	2.527.955.636	1.629.948.770	981.464.343	2.611.413.113	83.457.477	3.30
<b>Jumlah Ketahanan Pangan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.553.205.293</b>	<b>974.750.343</b>	<b>2.527.955.636</b>	<b>1.629.948.770</b>	<b>981.464.343</b>	<b>2.611.413.113</b>	<b>83.457.477</b>	<b>3.30</b>
<b>1 25</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>												
1 25 0100	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	0	0	5.067.210.764	20.224.103.024	25.291.313.788	5.436.554.374	19.686.657.695	25.123.212.069	(168.101.719)	(0.66)
<b>Jumlah Komunikasi dan Informatika</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.067.210.764</b>	<b>20.224.103.024</b>	<b>25.291.313.788</b>	<b>5.436.554.374</b>	<b>19.686.657.695</b>	<b>25.123.212.069</b>	<b>(168.101.719)</b>	<b>(0.66)</b>

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				Rp.	Rp.	Rp.	%	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
		3	4	5=4-3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
<b>1 26</b>	<b>Perpustakaan</b>												
1 26 0100	Badan Arsip dan Perpustakaan	0	0	0	0	4.148.742.773	13.355.547.817	17.504.290.590	4.417.723.251	13.579.978.317	17.997.701.568	493.410.978	2.82
	<b>Jumlah Perpustakaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.148.742.773</b>	<b>13.355.547.817</b>	<b>17.504.290.590</b>	<b>4.417.723.251</b>	<b>13.579.978.317</b>	<b>17.997.701.568</b>	<b>493.410.978</b>	<b>2.82</b>
	<b>Jumlah Urusan Wajib</b>	<b>4.605.245.737.151</b>	<b>4.668.049.326.638</b>	<b>62.803.589.487</b>	<b>1.36</b>	<b>1.950.376.033.788</b>	<b>3.150.528.550.625</b>	<b>5.100.904.584.413</b>	<b>2.027.661.782.475</b>	<b>3.062.327.629.851</b>	<b>5.089.989.412.326</b>	<b>(10.915.172.087)</b>	<b>(0.21)</b>
<b>2</b>	<b>Urusan Pilihan</b>												
<b>2 01</b>	<b>Pertanian</b>												
2 01 0100	Dinas Pertanian	0	0	0	0	8.334.060.204	28.034.508.609	36.368.568.813	8.435.383.744	27.655.995.618	36.091.379.362	(277.189.451)	(0.76)
	<b>Jumlah Pertanian</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.334.060.204</b>	<b>28.034.508.609</b>	<b>36.368.568.813</b>	<b>8.435.383.744</b>	<b>27.655.995.618</b>	<b>36.091.379.362</b>	<b>(277.189.451)</b>	<b>(0.76)</b>
<b>2 06</b>	<b>Perdagangan</b>												
2 06 0100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	455.000.000	455.000.000	0	0	12.799.988.993	16.983.562.597	29.783.551.590	12.492.620.364	16.755.692.836	29.248.313.200	(535.238.390)	(1.80)
	<b>Jumlah Perdagangan</b>	<b>455.000.000</b>	<b>455.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.799.988.993</b>	<b>16.983.562.597</b>	<b>29.783.551.590</b>	<b>12.492.620.364</b>	<b>16.755.692.836</b>	<b>29.248.313.200</b>	<b>(535.238.390)</b>	<b>(1.80)</b>
	<b>Jumlah Urusan Pilihan</b>	<b>455.000.000</b>	<b>455.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.134.049.197</b>	<b>45.018.071.206</b>	<b>66.152.120.403</b>	<b>20.928.004.108</b>	<b>44.411.688.454</b>	<b>65.339.692.562</b>	<b>(812.427.841)</b>	<b>(1.23)</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>4.605.700.737.151</b>	<b>4.668.504.326.638</b>	<b>62.803.589.487</b>	<b>1.36</b>	<b>1.971.510.082.985</b>	<b>3.195.546.621.831</b>	<b>5.167.056.704.816</b>	<b>2.048.589.786.583</b>	<b>3.106.739.318.305</b>	<b>5.155.329.104.888</b>	<b>(11.727.599.928)</b>	<b>(0.23)</b>

Surabaya,

**WALIKOTA SURABAYA****TRI RISM HARINI**